

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Mengacu pada terminologi yuridis tersebut, maka otonomi dan desentralisasi bukan hanya ketentuan dari sebuah produk legislasi ataupun amanat konstitusi semata. Keduanya tidak juga hanya sekedar pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, akan tetapi dapat menjadi jembatan utama bagi percepatan pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Asumsi sederhananya, karena Pemerintah Daerah yang sehari-hari melaksanakan tugas pemerintahan di daerah tentu dianggap paling tahu permasalahan dan kebutuhan masyarakat daerahnya.

Asumsi sederhana itu bukan tanpa alasan ataupun argumentasi. Dalam sebuah Daerah Otonom, maka prakarsa kebijakan pembangunan dan pelayanan umum berasal dari kebutuhan riil masyarakatnya, yang dihimpun dari aspirasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tingkat kabupaten/kota. Proses pengambilan keputusan pun dapat secara intens dikomunikasikan dan didiskusikan, karena pada setiap saat para pemangku kepentingan dapat beraudiensi langsung dengan pengambil keputusan. Melihat proses yang sederhana itu, maka sesungguhnya kebijakan pembangunan di daerah merupakan refleksi dari keinginan dan aspirasi masyarakat dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kata *Pembangunan* sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi.<sup>2</sup> Pembangunan juga dapat di katakan sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.<sup>3</sup>

Pembangunan (*development*) merupakan konsep program untuk menghasilkan perubahan social(ekonomi politik) yang positif, berkesinambungan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan sebagai prasyarat utama untuk kehidupan manusia (tercakup dalam konsep *sustainable development* ).<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Andhi Nirwanto, *Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi*, ( Semarang : Aneka Ilmu, 2013 ), hlm. 2-3.

<sup>2</sup> Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : PT Ara Media Pustaka Utama, 2000), hlm. 1.

<sup>3</sup> Lambang Trijono, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 3.

<sup>4</sup> Robert M.Z. Lawang ( dalam buku Ishak, *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Pekanbaru : Program Studi Ilmu Politik program pascasarjana Universitas Riau, 2006 ), hlm. 310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Persoalan yang mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah adalah inkonsistensi antara UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 2004 dalam mendefinisikan dokumen dan basis legalitas dari dokumen perencanaan daerah. Perbedaan tersebut sering menyulitkan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan perencanaan daerah.<sup>5</sup>Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal memerlukan penyempurnaan. Salah satunya yaitu, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan antara perencanaan kabupaten atau kota dengan perencanaan provinsi masih perlu ditingkatkan. Selama ini banyak daerah yang perencanaan pembangunan daerahnya belum mengacuh kepada rencana pembangunan provinsi dan nasional. Dalam perencanaan tata ruang, masih banyak daerah yang belum menggunakan rencana tata ruang yang lebih tinggi sebagai dasar dalam mengembangkan kegiatan pembangunan daerahnya. Akibatnya, konsistensi dan sinergi dalam pembangunan daerah belum dapat secara optimal diwujudkan. Dengan demikian, Kepala Desa menjalankan tugasnya dengan menggunakan akal dan pikirannya secara sadar dan terkontrol artinya berpikir secara rasional dengan pertimbangan dan pikiran yang sehat dalam menjalankan tugas sebagai administrator guna mencapai tujuan disuatu organisasi.

Organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh

---

<sup>5</sup>Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Revisi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2011, hlm. 40.

perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu desa sebagai bentuk organisasi pemerintah yang terendah tentunya pelaksanaan aktivitas Kepala Desa adalah menjalankan aktivitas pelayanan terhadap masyarakat Desa guna mencapai tujuan dari pembangunan Desa. Desa merupakan suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan aktivitasnya menggunakan proses administrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan yang didasarkan pada pertimbangan objektif terhadap kemampuan dan karakter individu dengan tingkat efektivitas dan efisien setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Oleh sebab itu Kepala Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembangunan desa yang diarahkan pada pemanfaatan secara optimal potensi desa dan membangkitkan kesadaran masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip dan jiwa masyarakat Desa serta dilaksanakan sepenuhnya oleh segenap komponen masyarakat Desa atas dasar potensi dan kekuatan yang dimiliki Desa tersebut, karena pembangunan Desa merupakan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat Desa dengan inisiatif dan kesadaran dalam pelaksanaan pembangunan dari masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan suatu program pembangunan diperlukan adanya faktor manusia yang potensial. Potensi manusia di daerah pedesaan khususnya

---

<sup>6</sup>Luther Gulick (dalam buku Inu Kencana Syafie, *Ilmu Administrasi Publik*, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006 ), hlm. 52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ditujukan kepada Kepala Desa yang sangat besar peranannya dalam menentukan keberhasilan pembangunan didesa dalam segala bidang baik itu politik, ketertiban dan keamanan, ekonomi, maupun sosial budaya. Ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan didesa tergantung pada pribadi Kepala Desa itu sendiri, pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas, efisien dan aktivitas seluruh tatanan pemerintah termasuk peningkatan pembinaan, kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan, melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.<sup>7</sup>

Dimana hakikat dari otonomi daerah adalah efisien dan efektivitas Kepala Desa, yang pada akhirnya ditujukan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang pada hakikatnya semakin lama semakin baik disamping untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan secara luas. Konsep pembangunan dalam penelitian ini bersifat perubahan dan perbaikan kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah Desa yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena pembangunan yang baik adalah pembangunan Desa yang menjalankan keseimbangan antara pembangunan fisik dan mental yang melekat secara terpadu dalam program pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Wujud pembangunan tersebut berupa program dan kegiatan yang bernuansa aspirasi dan proaktif terhadap pengembangan kreasi masyarakat Desa setempat sehingga menumbuhkan norma pembangunan yang menjadi kebutuhan dan dambaan masyarakat sebagai perangsang dan penggerak

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.52.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk maju, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tentunya ini memerlukan pembangunan menuju perubahan sosial dimana masyarakat dan Kepala Desa dituntut secara bersama-sama untuk menciptakan sikap mental baru dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan sehingga masyarakat menguasai dan mengawasi sumber daya dan tujuan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan keinginan bersama, dengan kata lain bahwa pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan masyarakat Desa menjadi lebih baik dan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga nanti terwujud masyarakat Desa memiliki pendidikan yang tinggi dan berpengalaman, memiliki tingkat IPTEK yang tinggi serta media informasi yang mendukung yang dibutuhkan masyarakat dalam usaha pembangunan.<sup>8</sup>

Sebagai seorang Kepala Desa sekaligus pemimpin dalam pemerintahan Desa maka seorang Kepala Desa harus mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau bekerja sama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lain di atasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mengingat fungsinya dalam pembangunan yaitu<sup>9</sup>

1. Sebagai Stabilisator
2. Sebagai Inovator
3. Sebagai Pelopor
4. Sebagai Modernisator

Dari pendapat tersebut cukup jelas bahwa Peranan Kepala Desa dalam pembangunan Desa merupakan perilaku dari administrator Desa yang diharapkan

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.52.

<sup>9</sup> Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan konsep, dimensi, dan strateginya* (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2014), hlm.142.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan atau perilaku yang sudah ditetapkan untuk dijadikan administrator desa sebagai seorang yang membuat keadaan stabil baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan , kemudian sebagai seorang yang membuat pembaharuan atau prakarsa juga sebagai seseorang yang berjalan didepan memulai sesuatu yang dapat diikuti oleh masyarakat. Untuk mengantisipasi aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta menghadapi perkembangan yang terjadi dalam lingkungan Desa yang secara langsung akan berpengaruh terhadap roda pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan dan sekaligus peluang diperlukan adanya Kepala Desa yang tangguh yang didukung sistem dan mekanisme kerja yang profesional.<sup>10</sup>

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang penyelenggara Pemerintahan Desa pasal 14 dijelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :<sup>11</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.142.

<sup>11</sup> Undang-undang Desa Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Membina ketenteraman dan Ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan Teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Kepala Desa berkewajiban :<sup>12</sup>

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

---

<sup>12</sup>*Ibid,*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan Gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan Aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.<sup>13</sup>

Desa Ukui Dua mempunyai sejarah yang sangat panjang dari terbentuknya Desa pada tahun 1935 oleh masyarakat asli Desa Ukui Dua. Desa Ukui Dua

---

<sup>13</sup>*Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tiga dusun yaitu Dusun Pinang, Dusun Tanjung Rimbah, dan Dusun Kampung Soni dan memiliki 4 Rukun Warga (RW) serta 17 Rukun Tetangga (RT).

Desa Ukui Dua terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ukui.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Redang Seko (INHU).
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Gajah/Desa Lubuk Kembang Sari.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kerumutan.

Mata pencaharian masyarakat Desa Ukui Dua umumnya adalah di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Selain itu, mata pencaharian masyarakat Desa Ukui Dua adalah berdagang, nelayan, dan buruh di Perusahaan swasta yang ada di wilayah Desa Ukui Dua. Sarana prasarana yang ada di Desa Ukui Dua meliputi Kantor Desa, gedung SD, gedung SMP, gedung SMA, gedung SMK, Posyandu, dan sarana penunjang lainnya.<sup>14</sup>

Desa Ukui Dua merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ukui yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang memadai dan sedang berusaha membangun Desa agar menjadi Desa yang lebih maju dan berkembang. Pembangunan Desa Ukui Dua khususnya disegala bidang sangat diperlukan peranan Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan sehingga masyarakat di Desa Ukui Dua dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

---

<sup>14</sup>RAPBDES, *Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012*. BAB II.

**Tabel I.I. Program Rencana pembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2014**

No	Rencana Pembangunan	Sudah Terlaksana	Belum Terlaksana
1	Pembangunan gedung LKMD		Belum terlaksana
2	Pembangunan gedung serbaguna		Belum terlaksana
3	Pembangunan gedung puskesmas Desa		Belum terlaksana
4	Pembangunan Pasar Desa		Belum terlaksana
5	Pembangunan Balai Adat		Belum terlaksana
6	Pengerasan dan Semenisasi jalan	Sudah terlaksana	
7	Gedung TK	Sudah terlaksana	
8	Pembangunan Bak air bersih	Sudah terlaksana	
9	Pembangunan 16 buah sumur	Sudah terlaksana	
10	Pembangunan Posyandu	Sudah terlaksana	
11	Pembangunan lapangan Olah Raga	Sudah terlaksana	
12	Pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu		Belum terlaksana

**Sumber : Kantor Kepala Desa Ukui Dua Tahun 2015**

Dari tabel yang peneliti buat diatas dapat dilihat program rencana pembangunan yang belum terlaksana dari dua belas kegiatan tersebut diantaranya pembangunan gedung LKMD, gedung serbaguna, gedung Puskesmas, pasar Desa, Balai adat, dan pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Pembangunan yang sudah terlaksana diantaranya yaitu pengerasan dan semenisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan, gedung TK, pembangunan bak air bersih, pembangunan 16 buah sumur, Posyandu, dan lapangan olah raga karena pembangunan ini lebih diprioritaskan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan ada beberapa permasalahan yang dapat ditemukan di Desa Ukui Dua antara lain yakni :<sup>16</sup>

#### 1. Sebagai Stabilisator :

- a. Proses Menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat Desa Ukui Dua khususnya program Siskamling yang hanya berjalan satu bulan, alasan diadakannya ronda malam (siskamling) karena adanya kasus pencurian yang masuk kerumah-rumah warga misalnya pencurian sepeda motor, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya.
- b. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Desa khususnya program Gotong Royong belum terealisasi. Misalnya membersihkan pekarangan Desa seperti Kantor Kepala Desa, rumah ibadah (mesjid), dan rumah-rumah warga yang dilakukan dengan sistem upah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ukui Dua (program pendidikan dan pelatihan) belum terealisasi .

#### 2. Sebagai Inovator :

- a. Merancang dan menerapkan program pembangunan yang telah direncanakan belum terlaksana semuanya yang terdapat pada tabel I.I diatas tersebut.

---

<sup>15</sup>*Ibid,*

<sup>16</sup>*Op.,Cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### 3. Sebagai Pelopor :

- a. Mendongkrak serta meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam segi kerajinan tangan IRT (industri rumah tangga) yang tidak berjalan.
- b. Kepedulian terhadap pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang tidak berjalan yaitu pemeliharaan pos ronda, semenisasi jalan yang rusak.

#### 4. Sebagai Modernisator :

- a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih belum dikuasai yaitu tidak adanya Fingerprint di kantor desa, sarana Wifi, Email, Website, dan pamong Desa (Kades, kadus, Sekdes, kaur pembangunan, kaur Kesra, kaur keuangan, dan aparatur Desa lainnya) seharusnya disediakan juga Netbook / laptop guna untuk mempermudah urusan di Desa ukui dua.
- b. Kemampuan mengolah kekayaan alam belum berjalan dengan baik.<sup>17</sup>

Dari permasalahan yang sudah dibahas tersebut Peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memberi judul:

**"PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA UKUI DUA KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN ( Dalam Perspektif Undang-undang No 6 Tahun 2014 )"**.

<sup>17</sup> Ibid,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator Dalam Pembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ?
2. Bagaimana Peranan Kepala Desa Sebagai Inovator Dalam Pembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ?
3. Bagaimana Peranan Kepala Desa Sebagai Pelopor Dalam Pembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ?
4. Bagaimana Peranan Kepala Desa Sebagai Modernisator Dalam Pembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator Dalam Pembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ?
2. Untuk Mengetahui Peranan Kepala Desa Sebagai Inovator Dalam Pembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ?
3. Untuk Mengetahui Peranan Kepala Desa Sebagai Pelopor Dalam Pembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ?

4. Untuk Mengetahui Peranan Kepala Desa Sebagai Modernisator Dalam Pembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Memperkaya dan mempertajam khasana bagi perkembangan kepustakaan ilmu sosial terutama ilmu administrasi negara .
- b. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pemerintahan desa ukui dua sebagai masukan informasi dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih terhadap seluruh proses pembangunan.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak kepala Desa Ukui Dua khususnya dan penyelenggara pemerintah pada umumnya.
- d. Sebagai tambahan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis di bangku perkuliahan.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menerangkan dalam BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB ini terdiri dari pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TELAAH PUSTAKA**

Pada BAB ini penulisan mengemukakan teori yang erat hubungan nya dengan permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam BAB ini berisikan uraian mengenai metode penelitian, yaitu mengenai lokasi penelitian, jenis, dan sumber data dan metode pengumpulan data serta analisis data.

## **BAB IV: GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN**

Dalam BAB ini berisikan uraian tentang Gambaran Umum dan Objek Penelitian, yaitu mengenai keadaan geografi, kependudukan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat, dan sistem Pemerintahan Desa.

## **BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB ini Peneliti menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu mengenai identitas responden, Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan, rekapitulasi mengenai tanggapan responden tentang peranan kepala Desa Dalam pembangunan.

## **BAB VI: PENUTUP**

Dalam BAB ini peneliti memaparkan tentang kesimpulan dan saran mengenai peranan Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Ukui Dua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.